

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi akhir-akhir ini membuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) semakin dirasa penting. Kasus-kasus besar seperti krisis *subprime mortgage*, fenomena Golden Parachutes, hingga skandal Madoff dan Satyam, menunjukkan bahwa penerapan GCG mulai memudar.

Pertama-tama, krisis *subprime mortgage* ini merupakan hasil dari ketidakhatian dalam melakukan manajemen risiko, sehingga institusi-institusi finansial meloloskan kredit subprime bagi mereka yang sebenarnya tidak layak. Maka ketika suku bunga semakin naik, banyak debitur yang tidak bisa membayar, sehingga terjadilah kredit macet dan lonjakan penyitaan rumah. Sementara itu, sekuritas turunan dari subprime ini, yakni CDO, sekuritas yang dijamin oleh serangkaian pinjaman termasuk subprime, juga dipegang oleh banyak institusi finansial di seluruh dunia. Sehingga ketika pinjaman subprime macet, tentunya ikut berdampak buruk bagi CDO. Dalam kasus ini, *ethics* dan *good corporate governance* dipertanyakan, terutama karena kurangnya visi dalam mengelola risiko.

Selanjutnya kasus Bernard Madoff, yang mengguncangkan dunia ketika ia diberitakan menyerahkan diri dan mengaku bahwa telah melakukan *fraud* sebesar \$50 miliar atau setara dengan Rp550 trilyun, yang menjadikannya *fraud* terbesar sepanjang sejarah. Skema penipuan yang dilakukan Madoff ini adalah berupa skema investasi, dimana ia menjanjikan *return* tertentu bagi investornya. Padahal kenyataannya, investasinya tidak menguntungkan, dan serupa dengan sistem *money*

game atau gali lubang tutup lubang, dimana investor dibayar dengan setoran dari investor baru.

Kemudian Satyam, yang dijuluki dengan Enron India, karena kasus yang mirip, yakni melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, mulai dari melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari aktual, pencatatan kas yang sebagian besar fiktif, serta pengakuan utang yang jauh lebih kecil. Kasus ini merupakan contoh absennya *Good Corporate Governance* dan gagal terdeteksi oleh auditor dan regulator.

Sementara itu, fenomena Golden Parachutes, dimana para mantan-mantan CEO yang perusahaannya bermasalah pergi dengan bonus puluhan, bahkan ratusan juta dollar. Padahal, kinerja perusahaan tidak seberapa dibandingkan dengan bonus yang mereka peroleh. Kasus yang baru terkuak adalah John Thain, yang baru saja mengundurkan diri dari posisi CEO Merrill Lynch setelah berbicara dengan CEO Bank of America Kenneth Lewis. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan, sepanjang kepemimpinannya ia menghabiskan \$1.2 juta atau sekitar Rp13 milyar hanya untuk mendekorasi ulang kantor. Kerugian Merrill Lynch kuartal IV ini sebesar \$15.4 miliar, dan tentunya tindakan John Thain melakukan redekorasi dalam kondisi perusahaan di tengah krisis jelas menyalahi *Good Corporate Governance*.

Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus fraud seperti yang baru-baru ini terungkap kasus Selly Yustiawati (SY), dan kasus Melinda Dee (MD), seorang manager Bank Asing. Kasus SY dilakukan dengan modus melakukan bisnis fiktif, dia menjual konsep bisnis kepada korban-korbannya secara meyakinkan sehingga mereka tergiur, percaya, dan menginvestasikan uangnya. Sudah dapat ditebak korban-korbannya dijanjikan keuntungan yang melebihi kewajaran dalam dunia

bisnis, akibatnya korban-korbannya tertipu, dan pelaku melarikan diri. Kasus SY diduga masuk kelompok penipuan. Sedangkan kasus MD memperlihatkan modus dengan cara mengambil uang dari rekening-rekening nasabahnya, dan dengan kerjasama serta akses (kekuasaannya) yang dimilikinya bisa memindahkan (transfer) dari korban-korbannya kepada rekening miliknya (penguasaannya). Kasus MD diduga masuk kelompok pencurian.

Survey dari *Association of Certified Fraud Examiner* dalam *Report to the Nations on Occupational Fraud 2010* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi 3 besar di Asia baik dari segi kerugian maupun frekuensi kasus Fraud terjadi. Berdasarkan survey tersebut diperoleh suatu fakta bahwa di Asia, sebagian besar kasus Fraud dapat terungkap karena adanya tip dan pemeriksaan oleh Internal Auditor bukan oleh eksternal Auditor. (<http://jtanzilco.com/>).

Internal Auditor dapat memainkan peran penting dalam mencegah dan mengurangi terjadinya Fraud di organisasinya dengan memahami motivasi mengapa orang melakukan Fraud. Seorang ahli, Donald R. Cressey (seperti yang di kutip Theodorus M Tuanakota, 2007:105), dari penelitiannya mengemukakan *fraud triangle* (segitiga *fraud*), dimana segitiga ini dibentuk dari tiga sisi, yaitu sisi pertama yaitu *Pressure* (tekanan) yang merupakan *perceived non-shareable financial need*, sisi keduanya, yaitu *Perceived Opportunity*, dan sisi ketiga, yaitu *Rationalization*.

- Tekanan (*Pressure*) : himpitan ekonomi, kebiasaan berjudi, masalah keluarga dan pekerjaan, diasingkan dari lingkungan sosial dapat menjadi tekanan bagi seseorang untuk melakukan Fraud
- Kesempatan (*Opportunity*): kelemahan sistem dan pengendalian internal, kepercayaan yang berlebihan dari seseorang, kedudukan yang tinggi dalam

organisasi ataupun kebiasaan yang sudah terpolat dapat menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan aksi Fraudnya

- Pembeneran (*Rationalization*): seseorang akan melakukan justifikasi dari tindakan yang dilakukannya apabila ia merasakan adanya ketidakseimbangan terutama dimana hadiah/imbalan tidak seimbang dengan hukuman/ denda yang diberikan.

Manajemen menggunakan jasa *Auditor Internal* untuk meminimalkan risiko. Auditor Internal adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan didalam organisasi perusahaan. Semakin besar volume dan kompleksitas kegiatan operasi perusahaan serta semakin ketatnya persaingan, mendorong manajemen untuk menggunakan fungsi *Auditor Internal* untuk dapat meminimalisir risiko dari berbagai kejadian potensial yang akan menghambat kegiatan operasional perusahaan.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh *Auditor Internal* dalam meminimalkan risiko, yaitu : (1) Mengarahkan perusahaan dalam meningkatkan laba usaha, baik rekomendasinya untuk meningkatkan penjualan maupun sarannya untuk menurunkan biaya usaha, (2) Memberikan analisis, penilaian, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan perusahaan dan (3) Menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan.

Dalam upaya menangani kejadian potensial, baik yang mempresentasikan risiko maupun perjalanan dalam mencapai tujuan, setiap organisasi memerlukan *ERM (Enterprise Risk Management)*, karena *ERM* mendukung penciptaan nilai dengan memudahkan manajemen untuk menghadapi kejadian potensial yang menciptakan ketidakpastian dan memberikan respon yang tepat untuk mengurangi

risiko yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu ERM diharapkan dapat meminimalisir besarnya risiko perusahaan secara sistematis dan efektif dalam menghadapi tuntutan dari berbagai pihak.

Enterprise Risk Management (ERM) digunakan sebagai suatu pendekatan pengelolaan risiko yang terkoordinasi untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan cara menyerahkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga setiap aktivitas yang dilaksanakan memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan yang berupa pengembalian investasi maupun meningkatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi.

Di Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara tertanggal 1 Agustus 2011, *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh BUMN. Pada pasal 2 disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya serta dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing- masing BUMN.

Namun kenyataannya, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) belum diimplementasikan di semua badan usaha milik nasional (BUMN), khususnya bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi (PISET).

Dari 25 BUMN bidang usaha PISET, yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG baru 16 badan usaha. Skor yang diperoleh dari hasil rekomendasi menunjukkan kualitas penerapan GCG pada BUMN bersangkutan. Sebanyak 11 BUMN memperoleh skor di atas 70 yang menunjukkan BUMN itu telah dilengkapi dengan infrastruktur penerapan GCG dan berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Beberapa BUMN dengan skor di atas 70 itu antara lain PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja, PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Timah, PT Krakatau Steel, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Inti dan PT LEN Industri. (www.kompas.com, 8 Februari 2010)

Salah satu BUMN yang memiliki skor diatas 70, Telkom, menerapkan GCG dengan serius. Selama 2010, melalui sub-Direktorat Business Effectiveness Telkom telah melakukan desain ulang proses dalam rangka penyelarasan dengan perubahan bisnis Perusahaan yang merupakan langkah implementasi kebijakan transformasi Telkom di bidang GCG. Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perusahaan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari tidak hanya di tingkatan Komisaris, Direksi dan manajemen namun hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Selama bulan April-November 2010 IICG (*The Indonesian Institutes for Corporate Governance*) melakukan riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) terhadap Perusahaan publik (emiten), BUMN dan Perusahaan lain diluar kategori emiten dan BUMN, dan akhirnya menetapkan peringkat beberapa Perusahaan (termasuk Telkom dalam hal ini). Hasilnya, Telkom

kembali memperoleh predikat terbaik sebagai: *The Most Trusted Company* 2010 sesuai tema penilaian GCG tahun 2010 yaitu “GCG sebagai Budaya”.

Telkom juga seringkali terpilih oleh lembaga-lembaga pemeringkat GCG sebagai nominasi untuk diamati karena dipandang sebagai salah satu benchmark atau panutan bagi perusahaan lain. Beberapa pencapaian atas evaluasi tersebut antara lain adalah:

- Penghargaan yang diterima dari Majalah Finance Asia pada 21 Juli 2010, yaitu dalam kategori “*Best Managed Company*”, “*Best Corporate Governance*”, “*Best Investor Relation*”, “*Best Corporate Social Responsibility*”, dan “*Most Committed to a Strong Dividend Policy*”;
- Penghargaan yang diterima dari Majalah Business Review dan Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD) dalam kategori “*The Best GCG Non Financial Sector*”;
- Penghargaan yang diterima dari ajang penghargaan BUMN Award dengan peringkat “GCG BUMN terbaik kedua”;
- Penghargaan yang diterima dari ajang penghargaan *Corporate Governance Award* dengan peringkat sebagai “*The Best Right of Shareholders*”;
- Penghargaan tertinggi yaitu: “*Indonesia Most Trusted Companies*” atas hasil penilaian GCG oleh lembaga independen Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG) dan Majalah Swa dengan peringkat: “Sangat Terpercaya”. (www.telkom.co.id)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* dengan pengelolaan *Enterprise Risk Management* sebagai variabel intervening?
2. Seberapa besar pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* dengan pengelolaan *Enterprise Risk Management* sebagai variabel intervening?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud dari penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Auditor Internal terhadap pengelolaan *Enterprise Risk Manajemen* dan dampaknya terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* pada TELKOM.

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap *Good Corporate Governance* dengan *Enterprise Risk Management* Sebagai Variabel Intervening.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Akademis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* yang selama ini penulis peroleh dari artikel, jurnal maupun topik-topik yang ada pada dunia usaha di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada di Indonesia khususnya pada BUMN. Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian peneliti lainnya dalam pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai peran auditor internal dalam perusahaan untuk ikut serta dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau memberikan gambaran perusahaan akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.